

Abstrak

Opini merupakan pernyataan atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang berpengaruh penting bagi pengguna laporan keuangan dalam memberikan keputusan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa dan memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut penting bagi BPK untuk tetap berpedoman terhadap peraturan dan standar yang berlaku agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat semakin diandalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemberian opini LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020. Penulisan ini menggunakan data kualitatif dengan pengumpulan data metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh secara daring seperti dokumen, peraturan, situs resmi, dan lain-lain yang mendukung penyusunan karya tulis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 tidak sesuai dengan PSP 300 karena tidak menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu dan LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 tidak sesuai dengan ketentuan laporan auditor menurut SA 700 karena BPK tidak mencantumkan nama pihak yang dituju pada LHP. Namun dalam hal lain, pemberian opini atas LKPD Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan BPK telah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: opini, BPK, standar, peraturan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

An opinion is a statement of the fairness of the presentation of financial statements that has an important effect on users of financial statements in making decisions. BPK has the duty to examine and provide opinions on the Regional Government Financial Reports. In carrying out this task, it is important for BPK to remain guided by applicable regulations and standards so that audited financial reports can be more reliable. This study aims to determine the suitability of giving opinions on LKPD West Bandung Regency 2016-2020. This writing uses qualitative data with library data collection methods, namely collecting and processing data obtained online such as documents, regulations, official websites, and others that support the preparation of this paper. The results showed that the 2019 West Bandung Regency LKPD was not in accordance with the PSP 300 because it did not complete the Examination Result Report in a timely manner and the 2016-2020 West Bandung Regency LKPD LHP was not in accordance with the provisions of the auditor's report according to SA 700 because the BPK did not include the name of the party involved. aimed at LHP. However, in other cases, the provision of opinions on the LKPD of West Bandung Regency carried out by BPK is in accordance with applicable standards and regulations.

Keywords: *opinion, BPK, standards, regulations, Local Government Financial Reports*